

# TANTANGAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI SPM SUB- URUSAN BENCANA

[Dr. Ir. Agus Wibowo, M.Sc](#)

Direktur Pengembangan Strategi PB

Badan Nasional Penanggulangan Bencana



**BNPB**

# DULU

## Penanggulangan Bencana Reaktif

- Bergerak saat kejadian bencana
- Fokus pada penyelamatan korban dan aset

# KINI

## Penanggulangan Bencana Preventif

- Menitikberatkan pada upaya investasi untuk pengurangan Risiko Bencana
- **Memiliki visi ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana**



**RENCANA INDUK PB 2020-2044**  
“Mewujudkan Indonesia Tangguh  
Bencana untuk Pembangunan  
Berkelanjutan”



## **Indonesia tangguh bencana**

**“Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien.”**

# RENCANA INDUK PENANGGULANGAN BENCANA

## Perpres No.87 Tahun 2020 Rencana Induk PB Tahun 2020-2044



### APA ITU RIPB?

Merupakan pedoman nasional untuk penyelenggaraan PB yang berlaku selama 25 tahun dan menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.



### VISI PB DALAM RIPB 2020-2044

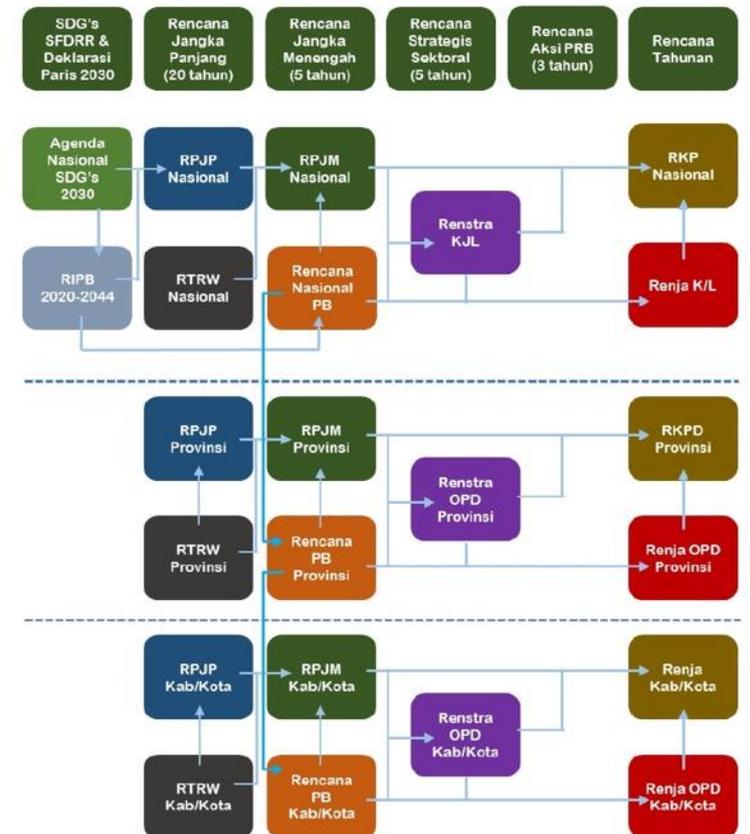
"Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan". Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien.



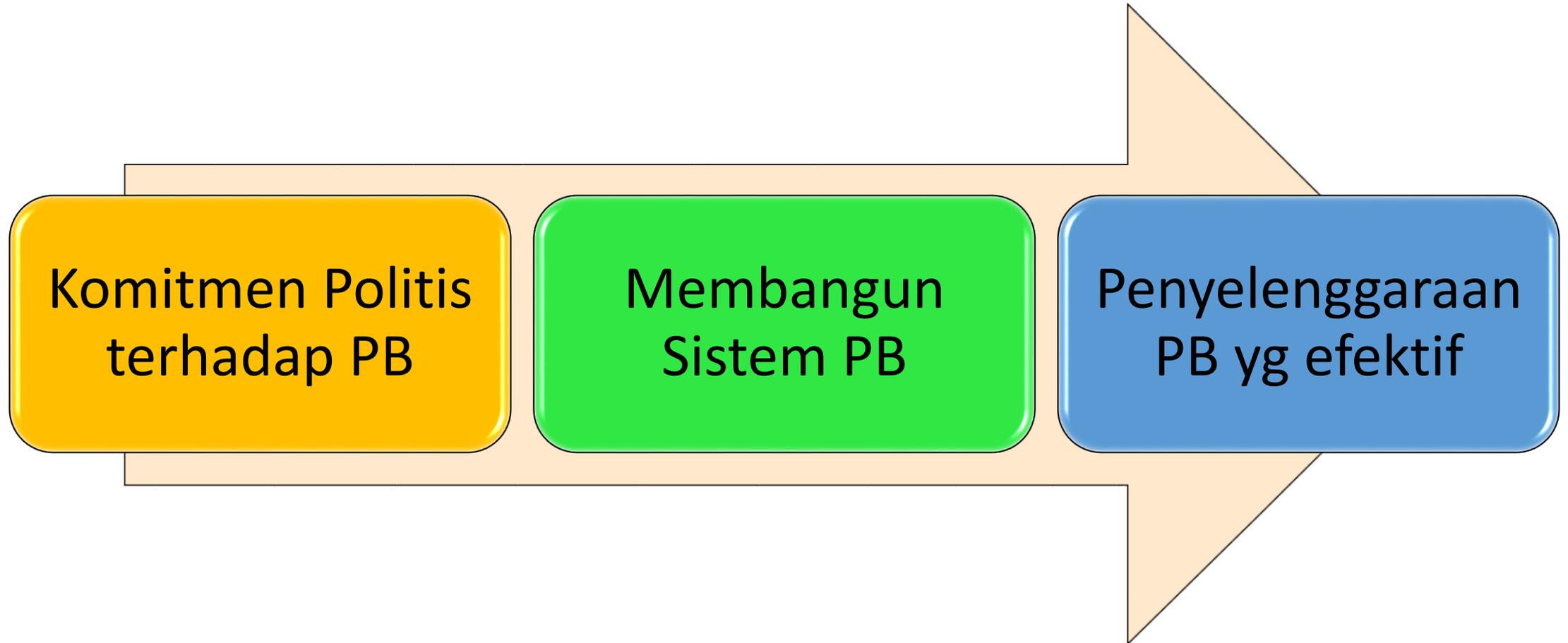
### MISI PB DALAM RIPB 2020-2044

1. Mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.
3. Mewujudkan penanganan darurat bencana dan pemulihan pascabencana yang prima.

### Keterkaitan Perencanaan PB dalam Sistem Pembangunan Nasional



# Kunci Sukses Penanggulangan Bencana



# INDONESIA TANGGUH BENCANA



# Peran Strategis Pemda dalam Penanggulangan Bencana pada Pra-Bencana

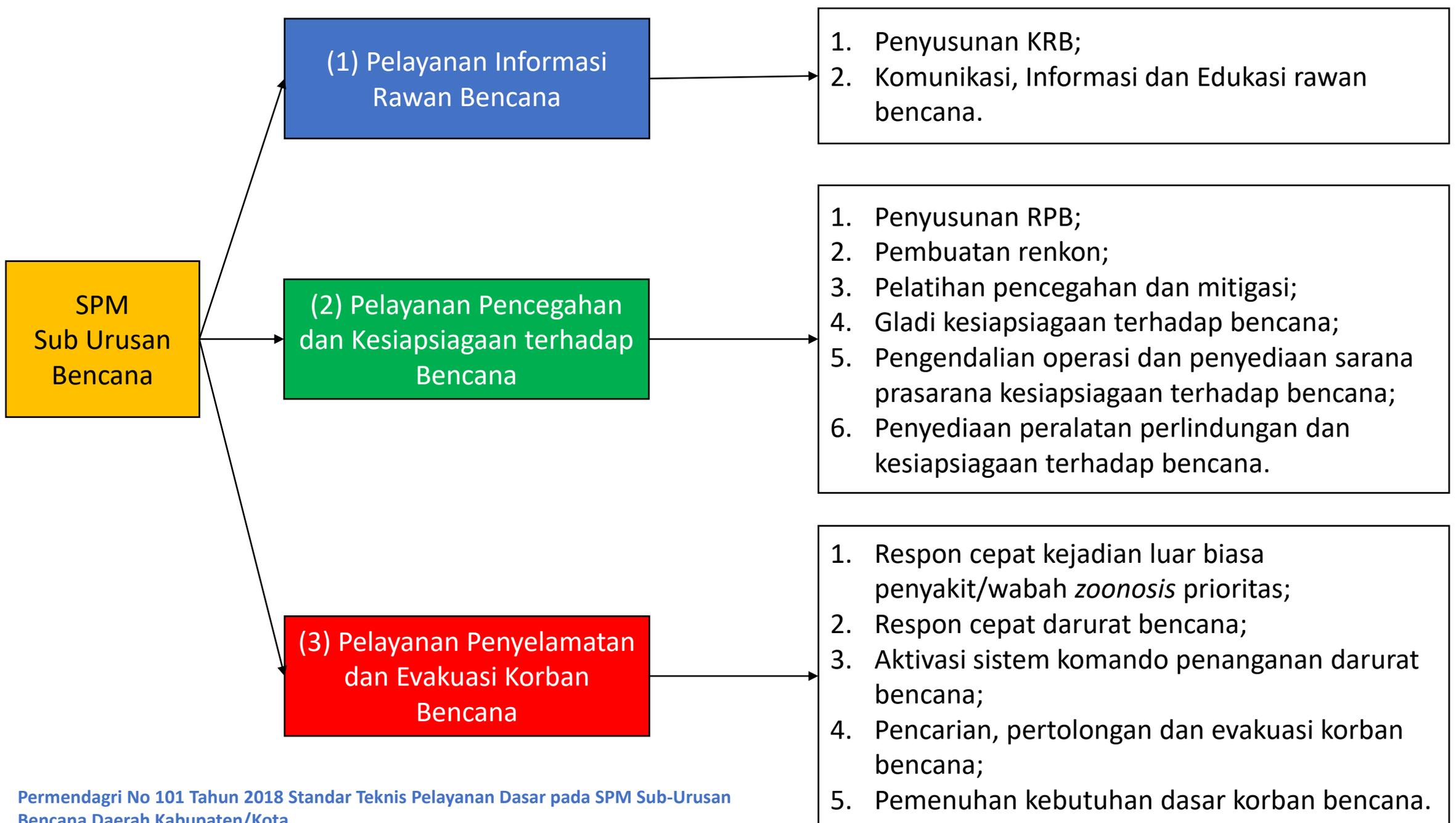


## Menurunkan Indeks Risiko Bencana melalui:

- Penyusunan Regulasi Kebijakan Daerah
- Penyusunan dokumen perencanaan penanggulangan bencana yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah
- Menetapkan Indikator Kinerja Utama terkait Kebencanaan seperti IRBI atau IKD
- Implementasi SPM Sub Urusan Bencana
- Kerja sama antar daerah
- Peningkatan Kapasitas SDM

Mengalokasikan Anggaran Penanggulangan Bencana



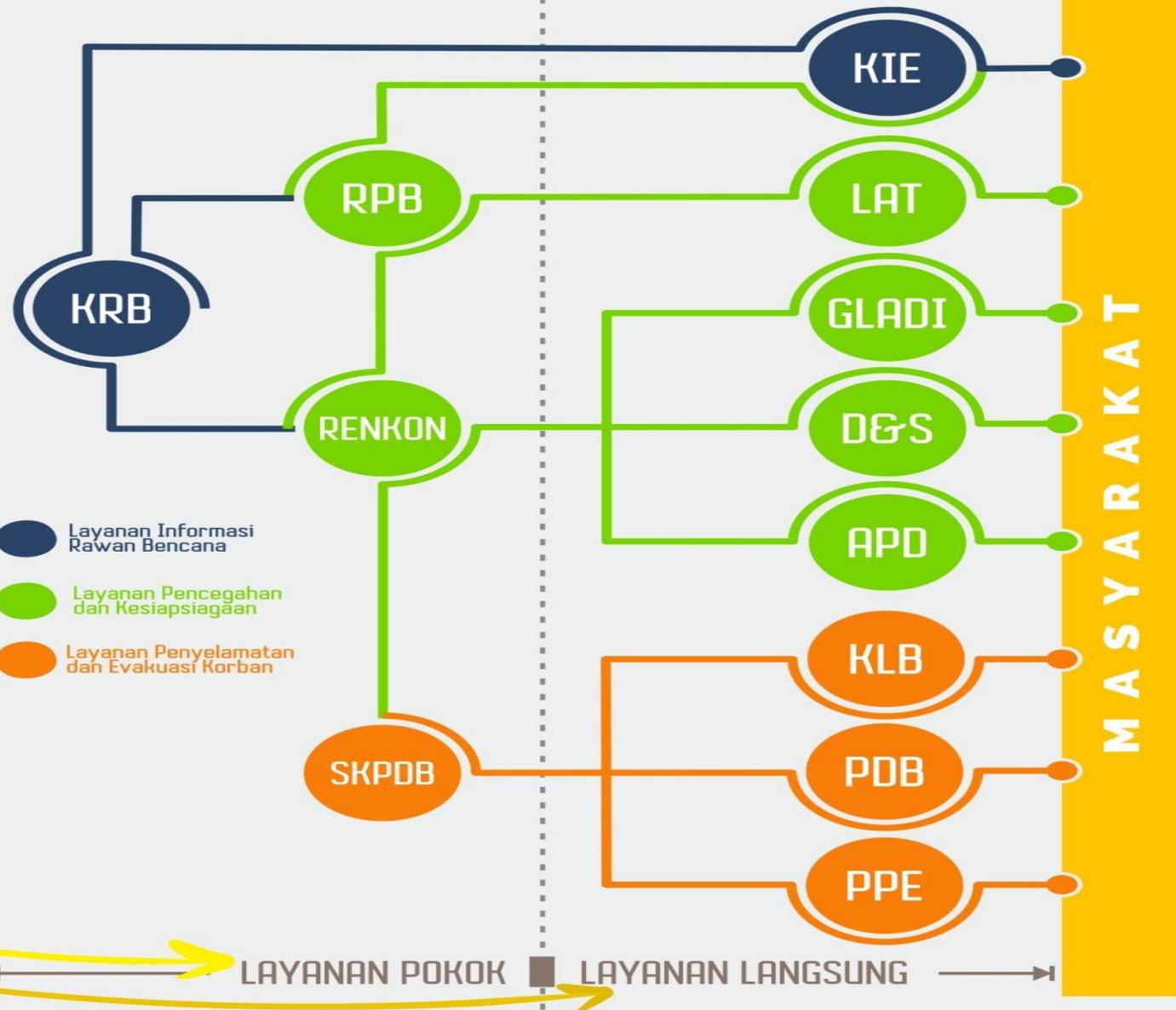


# Kaidah Alur Penerapan Sub Kegiatan



Tidak seperti SPM yang lain, SPM Sub-Urusan Bencana bersifat unik, karena hampir seluruh warga negara membutuhkan layanan ini. Untuk mengakomodasi kebutuhan seluruh warga negara, dibutuhkan berbagai layanan tambahan (Layanan Pokok) yang merupakan prasyarat dasar agar layanan lainnya (Layanan Langsung) dapat dirasakan langsung oleh warga negara.

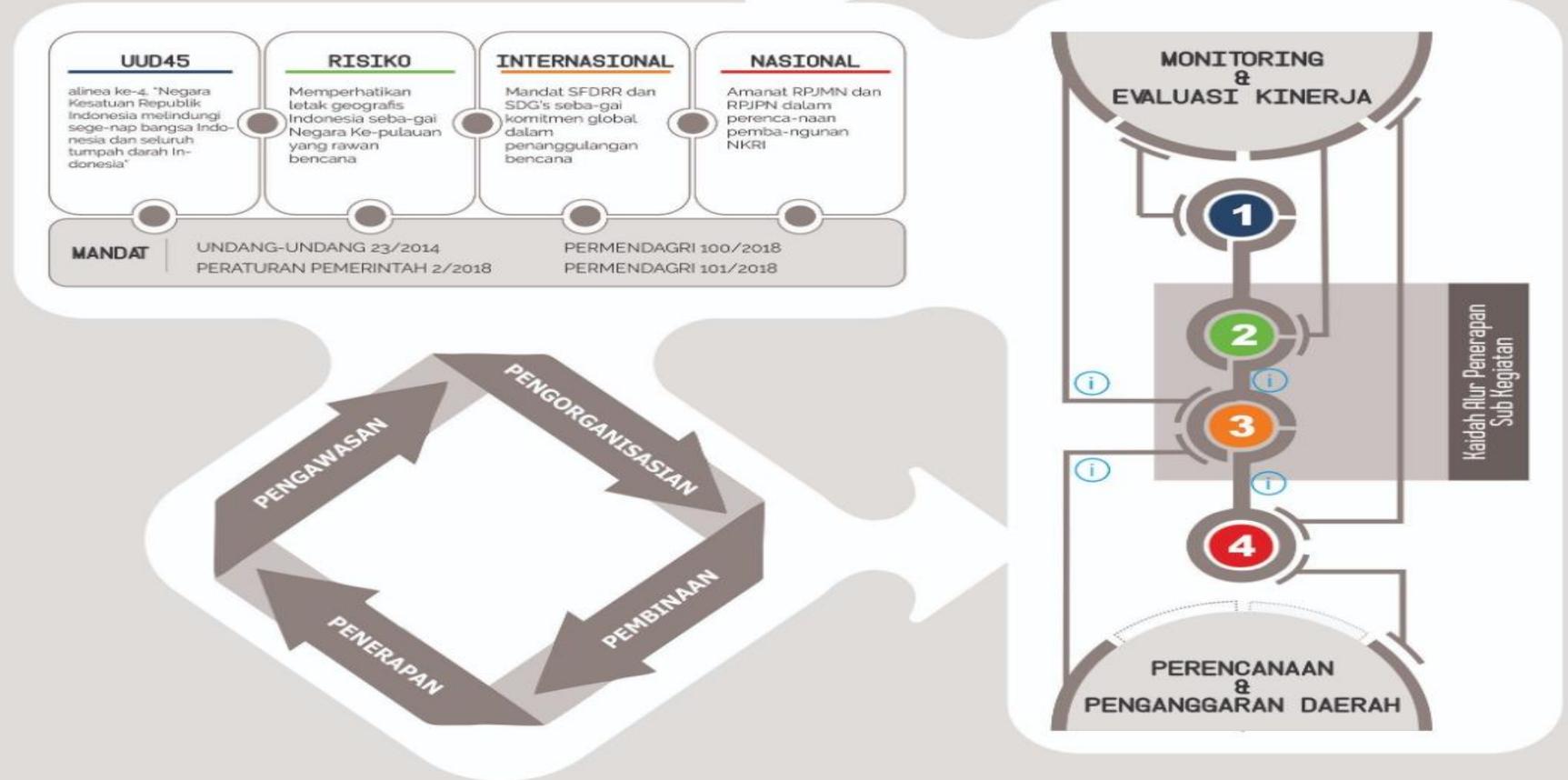
Hubungan antara **Layanan Pokok** dan **Layanan Langsung** dikenal sebagai Kaidah Alur Penerapan Sub Kegiatan. Kaidah ini memberikan alur penerapan yang lebih jelas untuk menjamin kualitas layanan langsung yang diterima oleh warga negara. Kaidah ini wajib diikuti oleh seluruh pemerintah daerah dalam menerapkan SPM.



# Skema Model Penerapan SPM Sub Urusan Bencana

Sumber: Kemdagri

## SKEMA MODEL PENERAPAN SPM SUB-URUSAN BENCANA



- 1** Pengumpulan Data
- 2** Penghitungan Kebutuhan
- 3** Penyusunan Rencana Pemenuhan
- 4** Pelaksanaan
- i** Inovasi & Harmonisasi

# Tantangan Pencapaian Target SPM Sub urusan Bencana

- Komitmen Kepala Daerah: yang sudah prioritas masih sedikit implementasi SPM apalagi yang tidak menjadi prioritas
- Ketersediaan Anggaran: Anggaran masih minim sehingga diperlukan inovasi dan kolaborasi
- Kapasitas Sumber Daya Manusia: masih banyak pergantian pegawai
- Sarana dan Prasarana belum memadai
- Proses pendataan belum optimal
- Koordinasi lintas sektor belum optimal
- Sosialisasi dan pelatihan implementasi SPM Sub Urusan Bencana terkendala Pandemi Covid-19

# Strategi Pencapaian Target SPM Sub urusan Bencana

- Menjadikan SPM Sub urusan bencana yang ditetapkan sebagai acuan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah
  - Menyusun Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) → SPM
  - Menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) → SPM
  - Mengintegrasikan RPB dengan Dokumen Perencanaan Daerah (Visi Misi Kepala Daerah, RPJMD, RKPD, Renstra OPD)
- Menyusun rencana pencapaian SPM Sub urusan bencana yang memuat target tahunan yang diintegrasikan ke RPJMD dan Renstra BPBD
- Target tahunan pencapaian SPM Sub urusan bencana dituangkan dalam RKPD, Renja OPD, Kebijakan Umum Anggaran, Renja Kerja dan Anggaran OPD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah
- Penyusunan Program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana agar mengacu Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 050/2708/2020 atau regulasi lain terkait
- Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPM
- Pelibatan dan kolaborasi multipihak dalam implementasi SPM Sub Urusan Bencana
- Dukungan penggunaan anggaran APBN, APBD melalui Donor, Dana Desa
- Penguatan Sosialisasi dan Pelatihan terkait penerapan SPM Sub-Urusan Bencana baik teknis, substansi maupun administrasi



Sebagai Negara yang Rawan Bencana  
Penerapan SPM Sub Urusan Bencana sangat penting  
sebagai bentuk Tanggung Jawab Pemerintah dalam  
melindungi warga dan menjadi acuan penilaian  
kualitas pelayanan pemda



**BNPB**

**TERIMA KASIH**

***MENUJU***

**INDONESIA**

**TANGGUH BENCANA  
(RESILIEN)**

**UNTUK PEMBANGUNAN  
BERKELANJUTAN**

**2045**

> RENCANA INDUK PB 2020-2044

*"Berdaya, Hidup Harmoni dan Berkelanjutan"*